



UNIVERSITAS TERBUKA

- Yudhi -

*Indonesia Yang
Berkeadilan Sosial
Tanpa Diskriminasi*

Editor

M. Husni Arifin
Rahmat Budiman

Hak Cipta © dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang ada pada Universitas Terbuka - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan - 15418 Banten - Indonesia
Telp.: (021) 7490941 (hunting); Fax.: (021) 7490147;
Laman: www.ut.ac.id.

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit

Cetakan pertama, Oktober 2016

Editor : M. Husni Arifin
Rahmat Budiman
Desain Cover : Budi Santoso
Lay-outer : Nono Suwarno
Ilustrator : Budi Santoso



Buku ini di bawah lisensi *Creative Commons* Atribusi Nonkomersial Tanpa Turunan 3.0 oleh Universitas Terbuka, Indonesia.

Kondisi lisensi dapat dilihat pada <http://creativecommons.or.id/>

305.09598

IND

INDONESIA yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi/BNBB/

M. Husni Arifin [et.al.]; - Cet. 1 ; Ed. 1 --,
Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2016.
264 hal; ill; 21 cm.
ISBN 978-602-392-090-7

1. Indonesia - keadilan sosial
2. Indonesia - diskriminasi
1. Judul

KATA PENGANTAR

“MEMBANGUN INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI”

Perkembangan pembangunan paska Reformasi menunjukkan semakin melebarnya ketimpangan kesejahteraan dan ketidakadilan diantara berbagai daerah dan berbagai kelompok masyarakat sebagai salah satu dampak otonomi daerah yang belum optimal. Hal ini juga didorong oleh sitem politik yang menyuburkan praktek *oligarchy* dikarenakan budaya paternasiltik yang masih sangat kental. Perbenturan antara sistem demokrasi yang menuntut adanya persamaan hak dan kebebasan individu disatu sisi dan budaya *paternalistic* dan *oligarchy* disisi lain mengakibatkan terjadinya “political chaos” yang menguras waktu, tenaga bahkan *resources*. Pembentukan berbagai lembaga non/extra struktur yang kurang relevan juga mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Kondisi *externalities* inilah telah menyandera program nawacita Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan melakukan reformasi sistem politik. Bersamaan Dies Natalis UT yang ke 32 yang mengambil tema Empat Windu Membangun Negeriku, FISIP-UT mempersembahkan kompilasi tulisan kritis dari Dosen FISIP UT untuk berpartisipasi mendorong *critical mass* dengan topik Membangun Indonesia yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi.

Mengutip dari Rawl (1999) Justice rules out that similarities and differences among persons are relevant in determining rights and duties and they specify which division of advantages is appropriate. Keadilan merupakan manifestasi dari “fairness and equity” sehingga tidak hanya secara komutatif dan distributif membagikan kesejahteraan oleh negara namun lebih jauh harus meletakkan keadilan pada aspek yang lebih luas memberikan kebebasan manusia sebagai subjek dalam merumuskan keadilan tersebut. Buku ini mengkaji berbagai aspek keadilan sosial dalam usaha untuk menyumbangkan pemikiran merumuskan hakikat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UT yang telah mendorong Dosen FISIP untuk mempublikasikan hasil karya intelektualnya dalam bentuk buku ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Editor yang telah bekerja keras untuk terwujudnya buku ini. Buku ini mengadopsi lisensi *Creative Common* dengan kondisi *Attribution, Non Commercial dan No Derivative* (CC BY NC ND) yang memberikan keleluasaan pembaca untuk menggunakan isi dalam buku ini untuk tujuan non komersial dan tidak melakukan perubahan isi dan makna. Semoga hadirnya buku ini dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam proses pemaknaan Keadilan Sosial di Indonesia.

Dekan FISIP

Daryono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO.14 TAHUN 2008 (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK) OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK INFORMASI TANPA DISKRIMINASI <i>Siti Samsiyah</i>	1
MENGAGAS PERUBAHAN MELALUI PLATFORM PETISI ONLINE <i>Yanti Hermawati dan Irsanti Widuri Asih</i>	19
MEDIA PROMOSI KOMUNIKASI POINT OF PURCHASE (POP) PADA PERPUSTAKAAN <i>Majidah</i>	47
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KUALITAS TERPADU PADA PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH: PENGALAMAN UNIVERSITAS TERBUKA <i>Ari Juliana</i>	53
PEDAGOGI FEMINIS DALAM PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PEREMPUAN DI INDONESIA <i>Made Yudhi Setiani</i>	73
OPEN EDUCATIONAL RESOURCES DAN HAK AKSES TERHADAP ILMU PENGETAHUAN DI INDONESIA <i>Daryono</i>	89
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI <i>CITY BRANDING</i> <i>Siti Aisyah</i>	103
IMPLEMENTASI GOVERNANSI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MELALUI APLIKASI <i>SOFT SYSTEMS METHODOLOGY</i> <i>Darmanto</i>	119
PERILAKU BULLYING DALAM NOVEL ANAK A LITTLE PRINCESS KARYA TANIA ZAMORSKY YANG DITERJEMAHKAN DARI BAHASA INGGRIS KE DALAM BAHASA INDONESIA <i>Afriani</i>	157
DEMOKRASI DAN PANCASILA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM POLITIK HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL <i>Seno Wibowo Gumbira</i>	173

KESADARAN DAN KESETARAAN HUKUM BAGI SEMUA WARGA NEGARA	
<i>Purwaningdyah Murti Wahyuni & Dewi Mutiara</i>	197
DINAMIKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DALAM KONTEK HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAHAN DAERAH (TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PARADIPLOMASI)	
<i>Mani Festati Broto</i>	211
CV PENULIS BUKU FISIP 2016	249

DAFTAR TABEL

MENGAGAS PERUBAHAN MELALUI PLATFORM PETISI ONLINE	
<i>Yanti Hermawati dan Irsanti Widuri Asih</i>	
Tabel 1. Penggunaan Media Sosial di Indonesia	23
Tabel 2. Daftar Media Sosial Populer	24
Tabel 3. Petisi <i>Online</i> dengan Dukungan di Atas Seribu Tanda Tangan	29
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI <i>CITY BRANDING</i>	
<i>Siti Aisyah</i>	
Tabel 1. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat	91
IMPLEMENTASI GOVERNANSI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MELALUI APLIKASI <i>SOFT SYSTEMS METHODOLOGY</i>	
<i>Darmanto</i>	
Tabel 1. Kerangka Umum (Framework) Penelitian	130
Tabel 2. CATWOE dan 3E dalam <i>Root Definition</i> Sistem Implementasi Konsep Governansi	132
Tabel 3. Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata menyangkut Governansi dalam Pengelolaan Hutan Lindung	136
Tabel 4. <i>Systematically Desirable</i> dan <i>Culturally Feasible</i> menyangkut <i>Governansi</i> dalam Pengelolaan Hutan Lindung	142
DINAMIKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DALAM KONTEK HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAHAN DAERAH (TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PARADIPLOMASI)	
<i>Mani Festati Broto</i>	
Tabel 1: Daya Saing 19 Provinsi Bawah Rerata Nasional	214
Tabel 2: Persentase Penduduk Miskin (%), 2010-2012	221
Tabel 3: Data kerjasama Sister City/Sister Province	226
Tabel 4: Data Negara-negara Anggota ASEAN, 2010-2011	235
Tabel 5: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kerjasama Luar Negeri Pemerintahan DKI Jakarta	241
Tabel 6: Data kerjasama Sister City/Sister Province Pemerintahan DKI Jakarta	242
Tabel 7: Data event internasional Pemerintahan DKI Jakarta	243

DAFTAR GAMBAR

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO.14 TAHUN 2008 (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK) OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK INFORMASI TANPA DISKRIMINASI	
<i>Siti Samsiyah</i>	
Gambar 1: Web-site Pemda TangSel	3
Gambar 2: web-site Pemda TangSel memuat informasi publik	8
Gambar 3: Web-site Pemda TangSel mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat	9
Gambar 4: Web-site Pemda Surabaya.....	12
Gambar 5: Web-site layanan informasi untuk masyarakat.....	13
Gambar 6: Situs Care2 Petitions	33
MENGAGAS PERUBAHAN MELALUI PLATFORM PETISI ONLINE	
<i>Yanti Hermawati dan Irsanti Widuri Asih</i>	
Gambar 1: Situs Resmi Gedung Putih Amerika Serikat	21
Gambar 2: <i>E-democracy</i> pada Masyarakat Berpengetahuan	26
Gambar 3: Situs Change.org	28
Gambar 4: Persentase Ragam Isu dalam Petisi <i>Online</i>	31
Gambar 5: Situs <i>Greenpeace</i>	32
Gambar 6: Situs Care2 Petitions	33
Gambar 7: Situs Avaaz	36
Gambar 8: Contoh kampanye <i>offline</i>	38
Gambar 9: Situs Ipetitions	39
Gambar 10: Situs Moveon.org	40
Gambar 11: Undangan Pertemuan <i>Offline</i> dan Respon Netizen Melalui Change.org	43
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KUALITAS TERPADU PADA PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH: PENGALAMAN UNIVERSITAS TERBUKA	
<i>Ari Juliana</i>	
Gambar 1: Kerangka Kerja Manajemen Kualitas Terpadu pada Institusi Pendidikan Tinggi	60
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI <i>CITY BRANDING</i>	
<i>Siti Aisyah</i>	
Gambar 1: <i>The Democratic Pyramid</i>	105
Gambar 2: Skema Urusan Pemerintahan di Indonesia	109

IMPLEMENTASI GOVERNANSI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MELALUI APLIKASI *SOFT SYSTEMS METHODOLOGY*

Darmanto

Gambar 1: Proses Dasar SSM (<i>The conventional seven-stage model of SSM</i>)	127
Gambar 2: Rich Picture Governansi Pengelolaan Hutan Lindung.....	131
Gambar 3: Model Konseptual Sistem Implementasi Konsep Governansi Pengelolaan Hutan Lindung	135

Pedagogi Feminis dalam Pendidikan Politik untuk Perempuan di Indonesia

Made Yudhi Setiani

Pendahuluan

Di banyak negara, ada kekhawatiran bahwa proses politik kurang terwakili dalam arti bahwa ia gagal untuk mencerminkan karakteristik dari sejumlah orang. Anggota legislatif didominasi oleh anggota kelas menengah dan laki-laki (Kymlicka, 1995). Perempuan dan kelompok minoritas di banyak negara menduduki kurang dari sepertiga dari kursi di parlemen (lihat Inter-Parliamentary Union, 2010). Parlemen akan dapat mewakili populasi perempuan dan minoritas jika parlemen mempunyai lebih banyak anggota dari kelompok ini.

Terbatasnya jumlah perempuan yang memasuki arena politik karena kendala yang mungkin dihadapi oleh perempuan pada umumnya di dunia dalam memasuki bidang politik. Hambatan tersebut dapat dikategorikan terjadi karena faktor politik, sosial-ekonomi, ideologi, psikologi, dan sosial-budaya (Shvedova, 2005). Dalam ranah politik, hambatan meliputi: kecenderungan 'model maskulin' kehidupan politik dan badan pemerintah, kurangnya dukungan partai dan akses terbatas ke jaringan politik, kurangnya mempertahankan kontak dan kolaborasi dengan organisasi publik lainnya, dan sifat dari sistem pemilu, yang mungkin tidak menguntungkan bagi kandidat perempuan (Shvedova, 2005).

Sementara itu, di ranah sosial-ekonomi, hambatan meliputi: kemiskinan dan pengangguran, buta huruf dan terbatasnya akses ke pendidikan dan pilihan profesi, dan beban ganda tugas rumah tangga dan kewajiban profesional (Shvedova, 2005). Selanjutnya, dalam ranah ideologi dan psikologi, hambatan meliputi: ideologi gender dari pola budaya dan peran sosial yang telah ditentukan sebelumnya untuk perempuan dan laki-laki, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mengikuti pemilihan, persepsi perempuan terhadap politik sebagai permainan "kotor", dan bagaimana perempuan digambarkan di media massa (Shvedova, 2005).

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik dapat menjadi problematik dengan alasan-alasan berikut yang saling berkaitan (Clover &

McGregor, 2011). Pertama, ranah politik tetap menjadi ruang pembuat kebijakan yang paling penting, di mana keputusan yang diambil setiap hari dapat mempengaruhi kehidupan perempuan. Kedua, alangkah tidak adil bila laki-laki memonopoli representasi (Philips, 1998, h. 229). Ketiga, pandangan dan perspektif perempuan cenderung untuk tetap tidak terdengar, tidak terwakili, dan di beberapa kasus, diabaikan (Shamshad, 2007, h. 139). Hal tersebut dapat melemahkan demokrasi dan menghalangi perempuan untuk menikmati hak dan tanggungjawab yang dinikmati laki-laki. Keempat, tanpa panutan yang terlihat di dalam ranah politik formal, perempuan muda tidak dapat membayangkan dirinya sebagai politisi (Clover & McGregor, 2011).

Saat ini, perempuan di Indonesia adalah kelompok mayoritas, tapi kadang-kadang mereka tidak lebih dari mayoritas bisu (*silent majority*) dan tidak ada dalam proses pengambilan keputusan atau dalam arena politik (Seda, 2002). Hambatan dasar untuk partisipasi politik perempuan di Indonesia berbasis pada ideologi, kebiasaan tradisional dan prinsip-prinsip agama (Davies, 2005).

Kehadiran perempuan dalam politik diperlukan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam ranah publik karena perempuan lebih tahu apa kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diproduksi untuk kepentingan perempuan akan didasarkan pada kebutuhan riil mereka. Itulah mengapa saya berpikir program pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam politik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian dapat bekerja untuk mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan perempuan. Untuk merancang program pendidikan politik yang mungkin sesuai dengan kebutuhan perempuan, saya berpendapat bahwa pedagogi feminis dapat dijadikan sebagai pendekatan pedagogi, karena pedagogi feminis mempromosikan pemberdayaan, pembangunan masyarakat, dan dinamis dan bentuk negosiasi kepemimpinan (Shrewsbury, 1993).

Tulisan ini menganalisis bagaimana pemikiran pedagogi feminis dapat digunakan untuk membentuk dasar-dasar dan merancang pendekatan pedagogi yang digunakan untuk program pendidikan politik bagi perempuan di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka dalam politik. Tulisan ini hanya menawarkan beberapa prinsip feminis dari banyak prinsip pedagogi feminis. Tulisan ini disusun sebagai berikut: pertama akan dijelaskan prinsip-prinsip pedagogi feminis seperti yang telah dikembangkan

oleh para sarjana seperti Welch (2006), Tisdell (2000) dan Shrewsbury (1993). Kedua, akan dijelaskan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Ketiga, akan dijelaskan tentang pendidikan politik. Keempat, akan dijelaskan feminisme di Indonesia. Kelima, akan dianalisis bagaimana menerapkan pedagogi feminis untuk program pendidikan politik dalam konteks Indonesia. Keenam, saya akan melihat tantangan dan implikasi dalam menerapkan pemikiran feminis untuk pendidikan politik dalam konteks Indonesia. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

Prinsip-Prinsip Pedagogi Feminis

Terdapat prinsip yang berbeda dari pedagogi feminis dari sarjana yang berbeda. Prinsip pedagogi feminis dalam tulisan ini adalah prinsip pedagogi feminis dari Tisdell (2000), Shrewsbury (1993), dan Welch (2006). Pedagogi feminis adalah teori tentang proses belajar mengajar yang memfasilitasi perempuan sebagai peserta didik (Tisdell, 2000; Shrewsbury, 1993). Pedagogi feminis mendorong transformasi pribadi dari individu dengan mencoba untuk memperluas kesadaran, sehingga mereka menjadi lebih sadar kondisi sosial-budaya dan pengaruh pada diri mereka sendiri. Pedagogi feminis mendorong kapasitas untuk berpendapat dan mempunyai harga diri dalam mengkonstruksi dan mengekspresikan pengetahuan baru dan menjadi penulis penuh dari kehidupan mereka sendiri (Tisdell, 2000). Melalui diskusi dengan instruktur dan teman sekelas lainnya, peserta didik dapat mengekspresikan diri mereka sendiri. Mereka memiliki suara mereka sendiri dan mengembangkannya melalui interaksi diantara mereka.

Pedagogi feminis juga memiliki rasa hormat terhadap keragaman pengalaman pribadi (Welch, 2006). Pengalaman pribadi adalah penting. Hal ini berbeda untuk setiap individu dan feminis mendukung perbedaan individu. Lebih penting lagi, kaum feminis menunjukkan perbedaan gender: pengalaman hidup untuk anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki berbeda-baik dari segi *nature* dan *nurture*. Pengalaman pribadi bisa menjadi sumber yang valid dan berharga dalam mengetahui sesuatu, dan mirip dengan konsep pemberdayaan dari dalam. Selain itu, pedagogi feminis mendorong transformasi sosial dengan mengundang orang-orang yang mempunyai pengetahuan menjadi aktor di dunia melalui partisipasi dalam gerakan perubahan sosial dan diskusi kebijakan publik yang menjaga kepentingan perempuan dalam pikiran mereka (Tisdell, 2000).

Pedagogi feminis melihat ruang kelas sebagai lingkungan bebas dimana guru dan siswa bertindak sebagai subyek, bukan obyek (Shrewsbury, 1993). Menjadi subjek berarti bahwa guru dan siswa memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Guru tidak melihat siswa sebagai hal-hal yang dapat dimanfaatkan. Mereka melihat satu sama lain sebagai manusia yang layak sebagai manusia. Pedagogi feminis juga berusaha mencari transformasi penting dari akademi dan mengarah menuju langkah-langkah untuk memfasilitasi transformasi itu. Menurut Shrewsbury (1993), konsep sentral dari langkah-langkah ini adalah pemberdayaan, membangun komunitas, dan kepemimpinan.

Berkenaan dengan pemberdayaan, pedagogi feminis tidak melihat kekuasaan sebagai dominasi. Ia melihat kekuasaan sebagai energi, kapasitas, dan potensi. Tujuan dari kekuasaan sebagai energi, kapasitas dan potensi adalah untuk meningkatkan kekuatan semua aktor, bukan hanya untuk sebagian saja (Shrewsbury, 1993). Ini berarti bahwa kekuasaan tidak terlihat sebagai dominasi guru atau instruktur, tetapi siswa juga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses belajar mengajar dan untuk terlibat dengan subjek dalam cara-cara yang bermakna dan menarik untuk mereka (Chow, 2003). Kelas menjadi lingkungan yang demokratis yang ditandai dengan pengambilan keputusan bersama dan pembelajaran kolektif.

Shrewsbury (1993) juga mencatat beberapa fitur dari strategi kelas dalam pedagogi feminis dalam hal memberdayakan semua aktor. Pertama, meningkatkan peluang dan kemampuan siswa berkaitan dengan pemikiran dan tujuan mereka. Kedua, memperluas kemandirian siswa sebagai peserta didik. Ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap kelas dan terlibat dalam kelas sebagai tempat belajar. Keempat, meningkatkan ketrampilan dalam perencanaan, negosiasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Kelima, mengembangkan rasa percaya diri siswa dan guru dengan pengakuan implisit bahwa mereka mampu mengembangkan pelajaran dan menjadi agen perubahan. Keenam, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi belajar dan membantu mereka menghargai pemikiran mendalam dan kolaboratif yang dibutuhkan. Hal ini mungkin adalah fitur yang ideal, kita mungkin tidak selalu mencapainya, tetapi perjuangan untuk melakukannya adalah yang terpenting.

Strategi pemberdayaan menjadikan siswa menemukan suara mereka sendiri. Juga, mereka dapat membangun komunitas dengan orang lain dan

menemukan cara untuk bertindak atas pemahaman mereka (Shrewsbury, 1993). Pedagogi pemberdayaan tidak berarti bahwa instruktur atau guru tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan lagi. Bergerak dari kekuasaan dominan berkuasa sebagai energi kreatif yang lebih merata di antara para peserta (Shrewsbury, 1993).

Dalam pedagogi feminis, kelas dipandang sebagai sebuah komunitas pelajar di mana ada baik otonomi diri dan kebersamaan dengan orang lain yang kongruen dengan kebutuhan perkembangan baik perempuan dan laki-laki (Shrewsbury, 1993). Pedagogi feminis juga mencakup strategi pengajaran yang didasarkan pada konseptualisasi masyarakat yang meliputi otonomi dan individualitas dari anggota yang berbagi rasa hubungan dan keterkaitan satu sama lain (Shrewsbury, 1993).

Mengembangkan kepemimpinan juga merupakan fokus dari pedagogi feminis (Shrewsbury, 1993). Dalam kelas yang menerapkan pedagogi ini, siswa dapat belajar ketrampilan dalam bernegosiasi dan perencanaan, karena mereka memiliki kesempatan untuk terlibat dalam mengembangkan tujuan dan sasaran dari pembelajaran. Siswa dapat belajar bagaimana mengartikulasikan kebutuhan mereka dan kebutuhan orang lain dan belajar bagaimana menemukan hubungan antara mereka. Selain itu, mereka juga dapat belajar bagaimana menganalisis dan mencari alternatif atau bahkan memecahkan masalah yang mungkin terjadi di dalam kelas. Peran guru dalam pedagogi feminis adalah untuk membantu para siswa di kelas membangun masyarakat dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan, sehingga guru dan siswa dapat bekerja sama dalam kegiatan belajar mengajar.

Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Secara historis, perempuan di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Perempuan mengadakan Kongres pertama mereka pada tahun 1928, yang mendorong meningkatnya aktivis nasionalis perempuan. Kongres tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan di Indonesia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan. Selama perjuangan kemerdekaan, perempuan memainkan peran mereka dalam pelayanan militer dan di ruang publik (Parawansa, 2005).

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, muncul kesempatan yang ditawarkan untuk perempuan di Indonesia untuk terlibat dalam politik (Blackburn, 2004). Dalam pemilihan umum pertama tahun 1955, 17 perempuan atau 6,5 persen berhasil terpilih dalam parlemen. Namun, sampai pemilihan umum pada tahun 1997, persentase perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen kurang dari 12 persen.

Pada tahun 1995, ada upaya dari aktivis perempuan di dunia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Perempuan di Beijing. Dalam konferensi tersebut, delegasi membahas dua isu penting: kebutuhan untuk meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik dan memperkuat basis kekuatan mereka (Seda, 2002). Konferensi PBB ini juga mengatur resolusi yang memberi peluang bagi pemerintah di dunia untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen mereka untuk setidaknya 30 persen. Dengan kuota keterwakilan perempuan di parlemen, diharapkan negara-negara akan bergerak untuk memfasilitasi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi resolusi tersebut. Melalui Undang-Undang Pemilu 2008, partai-partai politik di Indonesia harus menyertakan 30 persen calon perempuan. Pada pemilihan umum tahun 2009, jumlah perempuan yang terpilih di kursi legislatif adalah 103 orang atau 18 persen. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014, dimana jumlah perempuan yang terpilih adalah 97 orang atau 17,3 persen dari 560 kursi (Puskapol UI, 2014).

Pada saat ini, sebagian perempuan di Indonesia masih memiliki kesulitan dalam berpartisipasi aktif dalam politik. Tantangan yang hampir sama dengan kendala yang dihadapi oleh perempuan pada umumnya, seperti faktor sosial-ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hambatan mendasar yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik yang berbasis di ideologi, kebiasaan tradisional dan prinsip-prinsip agama (Davies, 2005). Beberapa kalangan di Indonesia masih menganggap bahwa perempuan harus memprioritaskan pekerjaan rumah tangga. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam arena politik, mereka harus menyeimbangkan antara pekerjaan rumah tangga dan kegiatan mereka di luar rumah. Terkadang perempuan disalahkan jika mereka tidak bisa mengelola tugas-tugas ganda dengan sangat baik. Persepsi ini, yang mungkin berasal dari laki-laki atau

perempuan itu sendiri, memberikan kontribusi ketidakpercayaan diri bagi perempuan untuk aktif dalam politik. Di sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia, kondisi ini jarang ditemukan lagi. Namun, di daerah pedesaan masih merupakan persepsi umum.

Tantangan lain yang membuat sebagian perempuan di Indonesia enggan untuk berpartisipasi dalam politik adalah nilai-nilai agama. Kesetaraan dalam peran politik sering memiliki kendala dari interpretasi ajaran agama untuk membatasi atau bahkan secara tekstual melarang perempuan menjadi pemimpin masyarakat. Penafsiran ini sering digunakan sebagai larangan penampilan perempuan sebagai tokoh masyarakat, mulai dari lembaga sosial seperti yayasan, organisasi masyarakat hingga kepemimpinan politik, khususnya kepemimpinan negara. Dalam masyarakat patriarkal, ada pandangan bahwa pemimpin dalam masyarakat atau negara seharusnya dimiliki oleh laki-laki, bukan perempuan (Yayasan Cakrawala Timur Surabaya, n.d). Misalnya, pada tahun 2001 sekelompok kecil fundamentalis Islam berdemonstrasi menentang Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta, mengklaim bahwa perempuan tidak dapat menjadi presiden (Davies, 2005).

Pendidikan Politik

Pendidikan politik dapat diajarkan secara formal dan informal di sekolah maupun di dalam masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan politik adalah pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa. Pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai budidaya kebajikan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dilihat sebagai suatu kegiatan oleh warga negara untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah yang dirancang baik secara langsung maupun tidak langsung (Verba & Nie, 1972; Houghton & Nelson, 1976). Kegiatan politik meliputi pemberian suara dalam pemilihan umum lokal atau nasional, menjadi anggota organisasi politik, organisasi bisnis, dan profesi, menandatangani petisi, menghadiri pertemuan, berpartisipasi dalam demonstrasi, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat, menjadi anggota parlemen, kegiatan koperasi, seperti bekerja informal dengan orang lain untuk memecahkan masalah masyarakat, dan sebagainya. Zukin (2006) mengkategorikan kegiatan ini sebagai keterlibatan politik. Dia membedakan keterlibatan politik dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan

masyarakat mengacu pada partisipasi ditujukan untuk mencapai publik tetapi biasanya melalui kerjasama langsung dengan orang lain. Keterlibatan masyarakat biasanya terjadi di kedua lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah, meskipun peran lembaga swadaya masyarakat adalah signifikan dan harus diakui. Dalam tulisan ini, saya merujuk partisipasi politik sebagai keterlibatan politik dan keterlibatan masyarakat.

Dalam masyarakat demokratis, pengetahuan kewarganegaraan diperlukan oleh warga dewasa. Untuk alasan ini, Boggs (1991) berpendapat bahwa pendidikan orang dewasa juga dapat menjadi agen untuk membantu mereka dalam mendukung sikap "civic-minded", dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa tidak hanya melibatkan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga tentang bagaimana untuk terlibat dan berpartisipasi dalam domain publik. Selain itu, juga tidak hanya membantu peserta didik memperoleh informasi dan pengetahuan, tetapi mendorong pengembangan tindakan yang dirancang untuk mencari solusi untuk suatu situasi (Imel, 2003).

Pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa melibatkan tiga domain, kognitif, afektif, dan tindakan (Boggs, 1991). Domain kognitif membantu peserta didik mencapai pengetahuan dan informasi tentang isu-isu politik, hukum, dan lokal dan nasional. Domain afektif membantu pelajar dewasa memahami peran emosi dan nilai-nilai bermain dalam urusan sipil dan untuk memperluas kemampuan mereka untuk membuat pilihan etis dan nilai melalui analisis moral dan keterampilan interpersonal; juga, domain afektif membantu dalam mengembangkan pemahaman tentang perbedaan budaya, politik dan sosial. Domain tindakan membantu mereka untuk terlibat dalam debat publik dari isu-isu publik dalam berbagai cara (Imel, 2003).

Pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa dapat diimplementasikan dalam pengaturan pendidikan informal, seperti pembelajaran berbasis masyarakat yang mungkin terjadi di pusat-pusat komunitas. Hal ini juga dapat disponsori atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan orang dewasa, kelompok aksi masyarakat, Non-Government Organizations (NGO), lembaga pendidikan, kelompok berbasis agama, organisasi pembangunan internasional, organisasi media, dan sektor swasta. Instruktur dapat menggunakan beberapa metodologi untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa ini: melalui

konsultasi dan dukungan layanan bagi komunitas, program kegiatan yang mengintegrasikan konten sipil dan isu-isu, seminar, lokakarya tentang topik tertentu dari perhatian warga (Boggs, 1991), diskusi kelompok, drama, simulasi, role play, program radio dan televisi, dan teknologi informasi (blog, forum internet). Dalam semua metodologi ini, saya pikir adalah mungkin untuk mengadopsi pendekatan pedagogi feminis dalam program pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa.

Feminisme di Indonesia

Sampai saat ini, Indonesia belum mengembangkan teori feminisme (Sadli, 2002). Kajian Studi Wanita di Universitas Indonesia, salah satu universitas bergengsi di Indonesia, telah mengembangkan wawasan baru tentang isu-isu perempuan dan perempuan Indonesia dalam pengaturan budaya yang bervariasi, tetapi tidak merupakan tubuh pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan feminisme khas Indonesia (Sadli, 2002).

Pada awal abad ke-21, feminisme atau bahkan istilah 'feminis', atau 'feminisme' masih menjadi isu dan dipertanyakan oleh banyak orang Indonesia, terutama yang tidak memberi perhatian terhadap isu-isu perempuan atau tidak akrab dengan perkembangan feminisme di negara lain (Sadli, 2002). Pengertian tentang feminisme dianggap konsep Barat dan tidak relevan dengan nilai-nilai Indonesia. Salah satu prinsip feminisme adalah kesetaraan gender, dan prinsip ini diwujudkan dalam Pasal 27 UUD 1945 dan undang-undang lainnya (Sadli, 2002). Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender sebenarnya telah diakui di Indonesia.

Sejak awal era reformasi pada tahun 1998, ketika Indonesia mulai transisi ke masyarakat yang lebih demokratis, banyak organisasi perempuan telah bekerja secara aktif pada isu-isu hak-hak perempuan dalam konteks feminisme, seperti Kapal Perempuan yang berkaitan dengan keadilan gender dan pluralisme; Kalyanamitra yang peduli dengan hak-hak perempuan, terutama perempuan yang tertindas; Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Suara Ibu Peduli (SIP), dan sebagainya. Misalnya, pada bulan Februari 1998, puluhan perempuan terdidik yang menamakan dirinya Suara Ibu Peduli (SIP) mengadakan rapat umum di Jakarta untuk memprotes kegagalan pemerintah untuk memberikan susu dan makanan pokok lainnya selama

krisis moneter yang melanda Indonesia (Budianta, 2003). SIP digunakan ibu dan jaringan berbasis masyarakat sebagai ruang untuk pemberdayaan dan mengemukakan pendapat. Reli ini juga dapat dilihat sebagai pemecah keheningan perempuan, yang sebelum reformasi tidak memiliki cukup kesempatan untuk memiliki suara dalam ruang publik (Budianta, 2003).

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa beberapa prinsip feminis telah mewujudkan diri mereka di Indonesia dan terwujud dalam perhatian dan konteks yang khas Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan untuk dapat mengembangkan pedagogi feminis dalam pendidikan politik di Indonesia, selama orang-orang yang ingin melakukannya mengenali mana prinsip-prinsip dan praktik feminis yang signifikan untuk Indonesia. *Membangun masyarakat di dalam kelas, pemberdayaan perempuan dan mengembangkan suara mereka*, adalah prinsip-prinsip feminis tertentu dan praktek yang menjadi pusat untuk setiap pedagogi feminis dalam pendidikan politik Indonesia.

Implementasi Pedagogi Feminis dalam Pendidikan Politik untuk Perempuan

Dari sejarah perempuan dalam politik di Indonesia, saya pikir pendidikan politik masih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam politik atau kehidupan sipil. Juga, saya pikir pedagogi feminis membantu perempuan untuk lebih memahami materi pelajaran dan terlibat dalam pelajaran.

Boggs (1991) menunjukkan bahwa pendidikan politik yang ideal harus melibatkan pendekatan kognitif, afektif dan tindakan di mana perempuan memperoleh informasi atau pengetahuan tentang isu-isu kompleks, mengembangkan kebijakan sipil sebagai dasar bertindak dalam ruang publik, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan, pedagogi feminis diperlukan untuk memahami sepenuhnya masalah dan peran warga negara dan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan mereka sendiri tentang isu-isu dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu perempuan untuk memahami isu-isu sipil lebih mendalam dari perspektif mereka sendiri, karena dengan pendekatan ini peserta didik membangun keterampilan berpikir kritis dan membangun dialog atau diskusi dengan instruktur dan peserta didik lainnya.

Dengan pedagogi feminis, perempuan juga bisa membangun pengetahuan atas dasar pengalaman dan makna mereka sendiri. Melalui proses itu, perempuan dapat memahami hak-hak sipil, tanggung jawab, dan sebagainya karena mereka telah membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan sipil mereka sendiri. Perempuan juga didorong untuk bekerja membangun pengetahuan ini dengan orang lain, karena pengetahuan tidak sedang dibangun secara individual, tapi secara sosial. Proses ini memungkinkan setiap orang untuk meningkatkan pemahaman dengan menggunakan pemahaman orang lain.

Sebagai contoh, dalam sebuah lokakarya pendidikan politik, kelompok pelajar mendiskusikan konsep toleransi. Meskipun instruktur tahu konsep jawabannya, mereka fokus membantu peserta didik menyatakan kembali pertanyaan mereka dengan cara yang bermanfaat. Instruktur meminta setiap peserta didik untuk merenungkan dan meneliti pengetahuan dan pengalaman mereka saat ini. Ketika salah satu peserta didik datang dengan konsep yang relevan, instruktur menunjukkan kepada kelompok bahwa mungkin konsep tersebut adalah jalan masuk bagi mereka untuk mengeksplorasi. Setelah itu, peserta didik dan instruktur berdialog tentang apa yang telah mereka pelajari, dan bagaimana diskusi mereka membantu (atau tidak membantu) mereka untuk lebih memahami konsep. Dari jenis strategi pembelajaran ini, menurut pendapat saya, pembelajar dapat memperoleh pengetahuan dan dapat memahami tentang konsep toleransi. Mereka saling belajar dari satu sama lain dan membangun pemahaman baru tentang konsep.

Ketika perempuan membangun pengetahuan mereka sendiri dengan pengalaman mereka sendiri, mereka memiliki kesempatan untuk mengekspresikan suara mereka sendiri. Saya pikir itu adalah penting bagi perempuan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa untuk mengetahui dan memahami bahwa mereka memiliki hak untuk didengar. Pengalaman dari setiap perempuan dalam program mungkin berbeda, berdasarkan latar belakangnya. Di Indonesia, perbedaan bisa berdasarkan etnis, agama, pendidikan, status sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Masing-masing pengalaman yang berbeda dapat berkontribusi untuk setiap anggota kelas, sehingga mereka dapat membangun pengetahuan dari mereka.

Selain itu, saya pikir pedagogi feminis mempromosikan lingkungan yang demokratis. Itulah sebabnya konteks lingkungan belajar dalam program

pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa harus dalam struktur demokrasi di mana terdapat hubungan dan kerjasama antara guru dan peserta didik. Dalam diskusi, semua peserta didik dapat berpartisipasi dengan kesempatan yang sama dan terbuka, tanpa takut akan pembalasan. Semua pendapat akan dihargai dan didengar. Untuk itu, menggunakan pendekatan dialog yang memungkinkan suara peserta didik untuk didengar, adalah pendekatan pedagogis yang sesuai. Lingkungan yang demokratis juga dapat dibuat dengan memungkinkan konsensus dan suara untuk memutuskan kurikulum. Peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat dalam mengembangkan kurikulum, yang akan menantang mereka untuk belajar lebih banyak dan menjadi lebih tertarik dan puas dengan proses pembelajaran. Jenis kegiatan bisa membuat peserta didik menikmati belajar dan berlatih dalam situasi demokrasi yang nyata dan juga memberi mereka kekuasaan karena mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam program pendidikan politik, cara mengajar dan lingkungan belajar semacam ini adalah contoh yang baik bagi peserta didik untuk memahami dan merasakan seperti apa proses demokrasi.

Penutup

Saat ini, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih dapat dianggap rendah. Ada beberapa hambatan dalam ranah politik, sosial-ekonomi, psikologi, adat istiadat, ideologi, dan nilai-nilai agama. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pendidikan politik. Menurut Boggs (1991), pendidikan politik yang ideal harus melibatkan domain kognitif, afektif dan tindakan di mana peserta didik memperoleh informasi atau pengetahuan tentang isu-isu kompleks, mengembangkan kebajikan sipil sebagai dasar bertindak dalam ruang publik, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Tiga domain seperti kognitif, afektif dan tindakan dapat diterapkan jika kita menggunakan pedagogi feminis dalam program pendidikan politik, karena dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dalam lingkungan belajar feminis, peserta didik secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Mereka dapat terlibat lebih dalam dengan pelajaran, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang politik. Saya menyarankan penggunaan pedagogi feminis dalam mengembangkan

program pendidikan politik bagi perempuan dapat digunakan untuk ke depannya, tidak hanya untuk perempuan di Indonesia tetapi juga untuk semua kalangan, baik untuk laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa, dan mungkin merupakan cara yang cukup layak dan berkelanjutan untuk budaya Indonesia.

Daftar Pustaka

- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boggs, D. (1991). Civic education: An adult education imperative. *Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory*, 42(1), 46-55.
- Budianta, M. (2003). The blessed tragedy: The making of women's activism during the *reformasi* years. In A. Heryanto & S. Mandal (Eds.), *Challenging authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. London: Routledge Curzon, pp. 145-77.
- Chow, E., Fleck, C., Fan, G., Joseph, J., & Lyter, D. (2003). Exploring critical feminist pedagogy: Infusing dialogue, participation, and experience in teaching and learning. *Teaching Sociology*, 31(3), 259-275.
- Clover, D. E. & McGregor, C. (2011). A feminist study of a political education programme for women. *International Journal of Lifelong Education*, 30(6), 733-748, DOI: 10.1080/02601370.2011.625517
- Crittenden, J. (2008). Civic Education. In E. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter Edition*. Diunduh dari <http://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/civic-education>.
- Davies, S. G. (2005). Women in politics in Indonesia in the decade post-Beijing. *International Social Science Journal*, 184, 231-242.
- Huntington, S. & Nelson, J. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Imel, S. (2003). Adult civic education. *Practice Application Brief No. 30*. Diunduh dari <http://ericacve.org/pab.asp>
- Inter-Parliamentary Union (2010, March 1). *Women in national parliaments*. Diunduh dari <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>
- Kymlika, W. (1995). *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*. Oxford; New York: Clarendon Press.
- Parawansa, K. (2005). Enhancing women's political participation in Indonesia. In J. Ballington & A. Karam (Eds.), *Women in parliament: Beyond numbers. A revised edition*. (pp. 82-90). Stockholm: International IDEA.
- Puskapol FISIP UI. (2014). Analisis perolehan suara dalam pemilu 2014: Oligarki politik dibalik keterpilihan caleg perempuan. Diunduh dari http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/Laporan-Analisis-Suara-Pemilu-2014_PUSKAPOL_16-Mei-2014.pdf
- Rietbergen-McCracken, J. (n.d). *Civic education*. Diunduh dari http://www.pgexchange.org/images/toolkits/PGX_B_Civic%20Education.pdf
- Sadli, S. (2002). Feminism in Indonesia in an international context. In K. Robinson & S. Bessell (Eds.), *Women in Indonesia: Gender, equity, and development*. (pp. 80-91). Singapore: Institute of Asian Studies.
- Seda, F.S.S.E. (2002). Women and politics in Indonesia: A general overview of strengthening women's political participation. Diunduh dari <http://www.wdn.org/media/PDFs/Jakarta1.pdf>.
- Shrewsbury, C.M. (1993). What is feminist pedagogy? *Women's Studies Quarterly*, 21(3/4), Fall/Winter, 8-16.
- Shvedova, N. (2005). Obstacles to women's participation in parliament. In J. Ballington & A. Karam (Eds.), *Women in parliament: Beyond numbers. A revised edition*. (pp. 33-50). Stockholm: International IDEA.
- Tisdell, E. (2000). Feminist pedagogies. In E. Hayes, D. Flannery, A. Brooks, E. Tisdell, & J. Hugo, *Women as learners: The significance of gender in adult learning* (pp. 155-183). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Verba, S. & Nie, N. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. New York: Harper & Row.
- Welch, P. (2006). Feminist pedagogy revisited. *Learning and Teaching in the Social Sciences*. 3(3), 171-199.
- Wood, G.H. (1998). Democracy and curriculum. In L.E. Beyer & M.W. Apple (Eds.), *The curriculum: Problems, politics, and possibilities* (pp. 177-198). Albany: State University of New York Press.

Yayasan Cakrawala Timur Surabaya. (n.d). *Partisipasi politik perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah Jawa Timur*. Diunduh dari <http://cakrawalatimur.org/?p=192>.

Zukin, C., et.al. (2006). *A new engagement? Political participation, civic life and the changing American citizen*. New York: Oxford University Press.